

**Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953 Dan Relevansinya
Sebagai Pengembangan Sumber Materi Sejarah Indonesia Baru²⁷**

Oleh:

Risma Dwi Pangesti²⁸, Tri Yuniyanto²⁹, Musa Pelu³⁰

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe: (1) political developments during the Indonesian national movement. (2) Ki Bagus Hadikusumo's political role in 1938-1953. (3) the relevance of Ki Bagus Hadikusumo's political role as the development of material sources for the History of New Indonesia.

The method used in this study is historical. The steps taken in the historical method are heuristics, criticism, interpretation and historiography. The data sources used by researchers are primary and secondary sources. Data collection techniques use library research techniques. Data analysis techniques by conducting external and internal criticism based on the facts.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) the development of Indonesian politics began in the royal era which still used the traditional political system. Then a modern elite emerged which brought renewal to a more modern and advanced politics. Modern organizations emerged such as Boedi Oetomo, Sarekat Islam and Muhammadiyah. Political development in Indonesia is increasingly advanced and open because it can eliminate the colonial doctrine that religion and the State must be separated. (2) Ki Bagus Hadikusumo began to have a political role since becoming chairman of the Muhammadiyah in 1942-1952. During his tenure Muhammadiyah progressed due to the renewal of its organization and members. Besides that, Ki Bagus Hadikusumo dared to fight what was ordered by the Japanese government and joined the invaders if it benefited the Indonesian people such as joining PETA, Cu And Co, and Masyumi. Ki Bagus Hadikusumo became a member of BPUPKI and gave his opinion during the session on the basis of the Islamic State. (3). Relevance to the History of New Indonesia, namely the political role of Ki Bagus Hadikusumo included in the preparation material for Indonesian independence.

Keywords: *Ki Bagus Hadikusumo, political role, new Indonesian history.*

PENDAHULUAN

Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan Hindia Belanda merupakan daerah jajahan bangsa barat. Sebagai negara jajahan, Indonesia mengalami

²⁷ Ringkasan Penelitian Skripsi

²⁸ Penulis adalah mahasiswa S1 pendidikan sejarah FKIP UNS.

²⁹ Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

³⁰ Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

keadaan yang buruk. Dengan tekanan yang begitu besar membuat rakyat Indonesia takluk pada pemerintahan Belanda. Tidak ada hak untuk berpendapat, melawan, ataupun berpolitik. Pada masa Belanda, politik kolonial mengikuti kepentingan kekuasaan kolonial yang merugikan bangsa jajahannya (Sartono Kartodirdjo, 1999: 40). Penjajahan membawa perubahan dalam berbagai bidang, seperti sistem pemerintahan, industri, transportasi, dan pendidikan. Perubahan tersebut yang membuat rakyat Indonesia sadar akan sebuah bangsa dan tanah air yang menimbulkan sifat nasionalisme.

Sifat nasionalisme yang tinggi membuat munculnya organisasi-organisasi modern yang dibentuk agar perlawanan rakyat Indonesia lebih terorganisir. Pergerakan-pergerakan nasional menentang kolonial untuk membangun Indonesia (Moedjanto, 1988: 27). Diawali dengan lahirnya Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Pasundan yang membawa lambang identitas kebangsaan (Kartodirdjo, 2005: 3). Muhammadiyah adalah salah satunya, dan dijadikan sebagai agen perubahan yang menginginkan gerakannya sebagai gerakan Islam non politik, tetapi tidak anti politik (Syaiyid, 2015: 173). Rakyat Indonesia dipersulit untuk belajar, hanya kaum priyayi yang diperbolehkan oleh penjajah (Engelen, 1997: 2-3). Muhammadiyah muncul sebagai organisasi sosial kebudayaan yang prihatin terhadap pendidikan rakyat sehingga mendirikan sekolah yang dapat dinikmati semua kaum. Tidak anti politik, Muhammadiyah tumbuh menjadi organisasi yang besar dan diterima seluruh golongan.

Politik di dalam Islam mempunyai aturan dalam pelaksanaannya karena Islam bertugas untuk meluruskan sesuai dengan nilai-nilai moral. Seorang muslim diberikan kebebasan untuk ikut serta dalam organisasi kenegaraan dan memegang teguh ke-Islamannya. Sama seperti Belanda, Jepang juga mengendalikan fanatisme Islam, karena dianggap sebagai ancaman (Ricklefs, 1989: 236).

Tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berperan dalam masalah kenegaraan, salah satunya yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Muncul ketika Indonesia masih dalam jajahan, tidak membuat gerakan ini tunduk pada pemerintahannya. Budaya Indonesia dengan budaya barat sangat berbeda, masyarakat lebih menginginkan budaya Indonesia tidak dicampur dengan budaya barat yang dominan lebih bebas.

Di Indonesia sendiri ada golongan nasionalis Islam yang mempunyai pengetahuan akan Islam dan sikap nasionalis yang tinggi.

Nasionalisme menimbulkan rasa percaya akan diri sendiri, rasa tersebut diperlukan untuk mempertahankan diri dalam perjuangan menempuh keadaan-keadaan yang mengalahkannya (Soekarno, 1965: 3-4). Islam sejati tidak anti nasionalis, dan tidak akan membiarkan negaranya terpecah belah karena ulah penjajah. Seorang Nasionalis Islam harus dapat menyeimbangkan sifat Nasionalisme dan keIslamannya. Islam memiliki kekuatan yang besar, jika masyarakatnya mempunyai sifat nasionalisme yang tinggi.

Ideologi politik dalam Islam bersifat teokratis, yang berarti Tuhan diatas segalanya dan syariat Islam berada jauh lebih tinggi di atas manusia (Ricklefs, 2012: 138). Sebagai seorang nasionalis Islam maka nilai-nilai keislamannya dalam berbangsa dan bernegara harus selalu ditegakkan. Konsep nasionalis Islam melekat pada tokoh-tokoh yang berpegang teguh pada prinsipnya. Dalam aktifitas politiknya Islam dijadikan sebagai acuan yang memiliki nilai serta aturan dalam pelaksanaannya. Nilai tersebut adalah nilai moral yang dapat dijadikan sebagai suatu sikap kewibawaan sehingga digemari oleh tokoh nasional lainnya. Politik yang dipegang oleh Ki Bagus Hadikusumo adalah politik Islam, dimana tidak akan berhenti berjuang untuk melawan penjajah yang memporak-porandakan ajaran Islam dan membiarkan negaranya berdiri tanpa pondasi yang kuat (Djarnawi Hadikusuma, 1979: 26).

Ki Bagus Hadikusumo menjalankan perannya sebagai ketua Muhammadiyah dengan pemikiran-pemikiran yang modern. Tidak hanya mementingkan keagamanya saja, tetapi membantu proses kemerdekaan Indonesia. Berpegang teguh dengan keIslamannya, dalam momen-momen kenegaraan Ki Bagus Hadikusumo berani mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dengan tokoh-tokoh nasional lainnya (Mahfud MD, 2013). Bagi tokoh lain, mungkin dianggap kolot, tetapi itulah yang ada dalam diri Ki Bagus Hadikusumo.

Seorang dengan latar belakang santri yang menjunjung Al-Quran dan Hadist, Ki Bagus Hadikusumo ikut serta dalam masalah kenegaraan. Kebenaran

dan keadilan merupakan arti politik bagi Ki Bagus Hadikusumo (Djarnawi Hadikusuma, 1979: 26). Diawali dengan perannya di Partai Islam Indonesia, Chuo Sangi In, dan menjadi anggota BPUPKI. Berdasarkan pengetahuannya itulah Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan bahwa dalam dasar Negara harus ada unsur agamanya. Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa tokoh yang merasa bahwa usulan Ki Bagus Hadikusumo diidentikan dengan ide Negara Islam (Ahmad Mansur Suryanegara, 2010: 168-169). Karena hal tersebut, Ki Bagus Hadikusumo bersikap bijaksana dan pada akhirnya tercapai sebuah kesepakatan tentang dasar Negara yang sampai sekarang masih digunakan, yaitu Pancasila (Sekertariat Negara Republik Indonesia, 1998: xxi).

Ki Bagus Hadikusumo menjadikan dunia perpolitikan di Indonesia beragam. Ki Bagus Hadikusumo merupakan seorang Nasionalis Islam yang berasal dari kelompok santri dan selalu berusaha menerapkan agama sebagai pondasi dalam kehidupan (Donald K. Emerson, 1976). Hal inilah yang membuat penulis melakukan penelitian dengan Judul **“Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953 dan Relevansinya Sebagai Pengembangan Sumber Materi Sejarah Indonesia Baru”**.

KAJIAN PUSTAKA

Peran Politik, Kebudayaan Politik Santri, dan Historiografi Sejarah Indonesia Baru.

1. Peran Politik

Peran atau *role* adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang memiliki berbagai macam peranan yang berasal dari pola pergaulan hidupnya. Kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto (1982: 33) peran merupakan pola perilaku yang terkait dengan status, apabila seseorang melaksanakan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka dianggap telah menjalankan peran. Menurut Levinson dalam Soekanto (1982: 243-244) menyebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal:

- a. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Suhardono dalam bukunya Ahmad Patoni (2007: 40) menjelaskan bahwa peran awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut (Arimbi Horopoetri dan Santosa, 2003: 33) :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, yang berarti peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi, peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau *public supports*.
- c. Peran sebagai alat komunikasi, peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran digunakan sebagai cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.
- e. Peran sebagai terapi, yang dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peranan menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Setiap peranan bertujuan supaya antar individu yang melaksanakan peranan terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak.

Menurut Isjwara (1982: 27-28) teori politik mengutamakan Negara dalam keadannya yang bergerak, sebagai lembaga yang hidup di tengah-tengah

pertarungan tenaga-tenaga sosial. Sedangkan menurut Easton dalam S.P Varma (1990: 132-136) teori politik terdiri dari tiga unsur, antara lain:

- a. Keterangan tentang fakta-fakta deskriptif.
- b. Teori murni atau teori sebab akibat yang berusaha mencari hubungan yang dianggap ada antara fakta-fakta.
- c. Teori nilai yang menentukan keterangan-keterangan prefensi yang saling berhubungan.

Kata politik dalam Ensiklopedia Indonesia berarti hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan, lembaga-lembaga, dan proses politik, *preesure group*, tata pemerintahan, dan hubungan-hubungan internasional. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1989: 5) berpendapat bahwa politik adalah segala sesuatu yang ada relasinya dengan pemerintahan dan pengaturan serta penguasaan oleh Negara dengan cara memerintah suatu eritorium tertentu. Pusat perhatian politik tidak terlepas dari kekuasaan.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Memang politik selalu berkaitan dengan kegiatan kelompok seperti partai politik. Peranan masyarakat dalam politik bisa secara individu ataupun disalurkan melalui organisasi politik. Seperti Haji Samanhudi melalui Sarekat Islam, KH. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah, dan Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa (Alfian dan Hidayat Mukmin, 1985: 274-275). Tokoh-tokoh yang mempunyai peran politik pasti akan mempengaruhi kebijakan yang ada. Kebijakan mempunyai arti cara bertindak yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada atau mengambil keputusan dalam permasalahan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran politik adalah fungsi seseorang dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan dari sistem politik. Proses menentukan dan melaksanakan tujuan menyangkut perilaku penting yang dilakukan bagi kepentingan orang banyak, konsep pemikiran yang dicetuskan dalam sebuah sistem, dan selalu terkait dengan perebutan kekuasaan.

2. Kebudayaan Politik Santri

Kebudayaan merupakan usaha untuk memanusiaikan manusia sesungguhnya. Istilah kebudayaan digunakan manusia untuk mengatasi barbarisme, dan membuat manusia menjadi mengekspresikan dirinya. Kebudayaan sebagai kumpulan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat dan setiap kemampuan lain atau kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Alo Liliweri, 2014: 4). Kebudayaan tidak mengacu pada perilaku, akan tetapi berdasarkan nilai-nilai yang akan mempengaruhi perilaku. Ciri khas kebudayaan Indonesia adalah dengan adanya *cosmisch-hemeenschapsgevoel* sebagai persepsi dunia yang dominan. Artinya masyarakat Indonesia ini lebih menunjukkan sesuatu yang dianggap sebagai kesatuan total. Tidak akan ada pertentangan semata-mata karena kebudayaan ini merupakan makrokosmos yang terkandung dalam diri manusia sebagai mikrokosmos (Soerjanto Poespowardojo, 1989: 111-112).

Kebudayaan politik atau budaya politik merupakan aspek politik dari sistem nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh suasana zaman saat itu dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri (Khoirul Saleh, 2015: 312). Tipe-tipe kebudayaan politik ada tiga, antara lain (Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, 1984: 20-22):

- a. Kebudayaan politik parokial, dalam kebudayaan politik ini tidak ada unsur khusus dalam peran politiknya. Orientasi politiknya mengarah pada orientasi religious dan social yang diharapkan membawa perubahan. Parokialisme dalam system politik ini bersifat afektif dan normatif.
- b. Kebudayaan politik subyek, kebudayaan ini menyadari bahwa otoritas pemerintahlah yang mengarahkan masyarakat. Walaupun ada bentuk kompetensi yang terbatas, namun system politik ini sebenarnya bersifat pasif. Kebudayaan politik subyek lebih bersifat afektif dan normatif.
- c. Kebudayaan politik partisipan, diorientasikan terhadap system keseluruhan dan terhadap struktur serta proses politik. Masyarakat diarahkan pada obyek politik yang serba beragam.

Sementara tipe kebudayaan politik di Jawa ada abangan, santri, dan priyayi (Clifford Geertz, 2017). Abangan dan santri tentu memiliki perbedaan pandangan terhadap politik, itulah yang menjadi pembeda dalam perilaku politik masing-masing kaum (Donald K. Emerson, 1976). Politik di Indonesia, elite politik abangan dianggap memiliki kekuatan politik yang lebih kuat dibandingkan dengan elite politik santri. Akan tetapi, kebudayaan politik santri mempunyai jangkauan yang luas di Jawa, sedangkan abangan lebih kecil jangkauannya. Kaum elite abangan berasal dari para priyayi yang mempunyai peran dalam kekuasaan sebagai pelayan kepada raja atau yang berkuasa (Donald K. Emerson, 1976: 22). Hal inilah yang menyebabkan adanya jarak antara mereka dengan rakyat, walaupun para priyayi ini memperoleh kekuasaan akan tetapi semakin jauh dari rakyat dan terasingkan. Kebudayaan politik santri bisa mencampurkan dari sekularisme, Kristen, dan dari kebidaban iman lainnya sehingga dapat diterima kaum lain. Tidak adanya campur tangan kolonial adalah salah satu poin yang membuat santri lebih unggul daripada abangan yang dikendalikan oleh priyayi dan priyayi diarahkan ke pemerintahan Barat yang mempunyai konotasi negatif (Donald K. Emerson, 1976: 81-98).

Santri termasuk dalam tradisional Jawa, karena dalam peranannya santri yang dimaksud melakukan politik yang berkaitan dengan Islam. Santri merupakan para penuntut ilmu agama. Santri diidentikan dengan Islam, sejak dulu Islam dan politik saling berkaitan. Peran politik santri muncul pada masa kolonial Belanda, dimana Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) lahir sebagai gerakan terbesar. Kedua gerakan Islam ini pada awal berdirinya menyatakan bahwa tidak akan ikut campur pada dunia politik, namun nyatanya Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU) ini sejak lahir sudah bergelut dengan politik sampai sekarang. Kaum santri menganggap bahwa dengan terjunnya ke dunia politik merupakan pemenuhan ajaran dan pengabdian pada Tuhan atau *sabilillah* (Abdul Munir Mul Khan, 2009: 233).

Kebudayaan politik santri dapat disimpulkan bahwa santri yang sangat kental dengan ajaran agama Islam ikut serta dalam dunia perpolitikan, akan

tetapi masih menggunakan kebudayaan atau tradisional Jawa. Santri sebagai agen perubahan dalam dunia perpolitikan, karena selain aktif dengan ilmu keagamaannya dapat pula membuat perpolitikan sesuai dengan ajaran-ajarannya.

3. Historiografi Sejarah Indonesia Baru

Historiografi adalah suatu pembebasan atau liberalisasi (Sartono Kartodirdjo, 1982: 11). Historiografi merupakan perwujudan dari hal-hal yang sudah terjadi seperti dendam, kebencian, egoism atau kecintaan berlebihan, walaupun sebenarnya sejarah sendiri sebagai peristiwa yang memiliki dimensi beragam dan merupakan kontruksi yang tidak akan pernah selesai serta bersifat subjektif (Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, 2013: 15).

Sejarah dalam pandangan R. Mohammad Ali adalah (1) sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa-peristiwa dalam kenyataan sekitar kita, (2) cerita tentang perubahan itu (3) ilmu yang bertugas menyelidiki tentang perubahan dan sebagainya. Sejarah bukan sekedar melahirkan cerita dari suatu kejadian masa lampau tetapi pemahaman masa lampau yang didalamnya mengandung berbagai dinamika, mungkin berisi problematika pelajaran bagi manusia berikutnya.

Dalam penulisan sejarah harus berlandaskan pada ilmu-ilmu social dan yang paling penting dalam sejarah adalah perkembangan pengetahuan manusia dan peranan bangsanya. Jika dalam sejarah tidak ada peran manusia dan bangsanya, maka sejarah tidak akan pernah ada. Apa yang ditulis sejarawan sangat mempengaruhi masyarakat, karena sejarawan yang menyaring tradisi suatu Negara. Historiografi Indonesia selama ini tidak mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat, karena kritik yang dilakukannya tidak bersifat kritis terhadap historiografi lain, dan adanya keterbatasan metodologis yang dialami oleh sejarawan Indonesia. Sejarah harus dilihat sebagai sebuah proses secara holistic (Bambang Purwanto dan Asvi Warman Adam, 2013: 12).

Historiografi sejarah Indonesia baru lebih menekankan pada tokoh-tokoh yang mempunyai peran dalam Negara Indonesia. Seorang sejarawan dalam

menulis sejarah salah satu tokoh yang penting dalam suatu negara harus bersifat objektif, tidak hanya memandang tokoh tersebut dalam satu sisi. Situasi dan kondisi yang sedang terjadi biasanya mempengaruhi emosional penulis, oleh karena itu subjektivitas sangat tinggi. Masalah politik tidak dapat dihindari dalam sejarah, ketika sejarawan menulis mengenai tokoh yang disukainya maka akan diagung-agungkan walaupun tokoh yang dituliskannya melakukan salah, akan tetapi akan di jatuhkan jika sejarawan tidak menyukainya.

METODE PENELITIAN

Dalam abstrak ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Metodenya adalah dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber data terkait dengan penelitian ini yaitu mengenai peran politik Ki Bagus Hadikusumo pada tahun 1938-1953. Setelah sumber-sumber data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis dengan membandingkan data-data yang ada. Mencari dan mengumpulkan arsip atau dokumen yang terkait dengan peran politik Ki Bagus Hadikusumo tahun 1938-1953. Selanjutnya dokumen dijadikan alat penguji kebenaran bagi sumber sekunder yang berhasil dikumpulkan dengan sumber primer.

HASIL PENELITIAN

1. Perkembangan Politik Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia

Indonesia mulai mengenal politik sejak masa kerajaan, sistem politik pada masa itu masih bersifat tradisional. Ketika bangsa Barat datang ke Indonesia dan sejak zaman itu beralih menjadi Hindia Belanda sistem politik di kerajaan-kerajaan mulai berubah karena adanya sistem politik yang diterapkan oleh negara tersebut. Pemerintahan Belanda melakukan berbagai macam perubahan, namun yang paling utama adalah reorganisasi Agraria sebagai tujuan politik ekonomi Belanda (George D. Larson, 1990: 27). Politik Hindia Belanda menjadi terbatas ruang geraknya, karena pengaruh Belanda yang

mempunyai hak atas sistem politik di Hindia Belanda (George D. Larson, 1990: 30-40).

Elit modern sebagai pembaharu di Hindia Belanda pada abad ke-20 melakukan perlawanan kepada penjajah dengan mendirikan organisasi modern untuk pertama kalinya di Hindia Belanda yaitu Boedi Oetomo (Robert Van Niel, 1984). Organisasi ini didirikan pada 20 Mei 1908 di Jakarta (Sartono Kartodirdjo, 2005: 11). Politik Boedi Otomo adalah membangun masyarakat Hindia Belanda dengan label persaudaraan nasional tanpa adanya pandangan terhadap perbedaan yang ada, namun masyarakat Hindia Belanda paham dengan politik. Banyaknya organisasi yang terjun dalam dunia perpolitikan membuat masyarakat melek akan politik dan Boedi Oetomo tergeserkan. Organisasi-organisasi baru tersebut adalah Sarekat Islam dan Muhammadiyah (Sartono Kartodirdjo, 2005: 3). Berbeda dengan Boedi Oetomo yang anggotanya dari kalangan atas, Sarekat Islam mempunyai anggota rakyat umum terutama pedagang dan kalangan agama. Sarekat Islam mempunyai misi politik yang menuntut pemerintahan Belanda mendirikan dewan-dewan daerah dan memperluas hak-hak *Volksraad* untuk memajukan lembaga perwakilan (Deliar Noer, 1985: 130).

Muhammadiyah adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan asas agama (A.K. Pringgodigdo, 1994: 20). Muhammadiyah tidak menentang politik, bahkan anggotanya ada yang mengikuti perkumpulan politik. Muhammadiyah berhasil mengikuti arus politik dan ikut terlibat didalamnya. Politik di Hindia Belanda yang awalnya tidak mencampurkan agama, dalam perkembangan zaman akhirnya politik dapat berkembang berdampingan dengan agama. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para anggota organisasi keagamaan berhasil mendobrak paham yang diciptakan penjajah bahwa agama harus dipisahkan dari sistem pemerintahan (Mohammad Iskandar, dkk, 2000: 45).

Muhammadiyah dapat berhadapan dengan pemerintahan kolonial karena menggunakan politik kooperatif walaupun ada organisasi yang menggunakan politik nonkooperatif (Hedar Nashir, 2011: 53-54). Muhammadiyah

berkembang pada saat Indonesia menggunakan politik baru dan banyaknya perkembangan partai politik sekuler serta organisasi seperti partai komunis (Alfian, 1989: 7). Muhammadiyah telah bermain politik secara langsung dan terbuka terhadap administrasi kolonial pada waktu itu, hal ini karena adanya penghapusan Partai Komunis Indonesia setelah adanya pemberontakan yang gagal pada tahun 1927, oleh karena ini Muhammadiyah berkembang dengan pesat (Alfian, 1989: 8).

Politik di Hindia Belanda dari tahun ke tahun mengalami perubahan, pada tahun 1930-an adanya perkembangan yang pesat dalam bidang perusahaan, terutama perkebunan (Marwati Djoened Poesponegoro, 1990: 84). Pada tahun 1937 MIAI atau Majelis Islam ala Indonesia berdiri dan dipimpin oleh J.H. Wahid Hasjim, Dr. Soekiman, Wondoamiseno dan K.H. Mansur (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978:195). MIAI ini menjadi organisasi besar karena gabungan dari partai-partai Islam yang ada di Indonesia.

Taktik Jepang ketika awal menguasai Indonesia adalah dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, karena rakyat sangat mendukung kaum nasionalis (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978: 220). Gerakan-gerakan politik tetap boleh berdiri, salah satunya yaitu MIAI (Mohammad Iskandar, dkk, 2000: 59). MIAI mempersatukan organisasi-organisasi Islam Indonesia, sehingga dijadikan tempat permusyawaratan dan hasil putusannya harus dipegang teguh oleh para anggotanya (Deliar Noer, 1985: 262). MIAI tahun 1943 menggerakkan pemuda Indonesia, karena cita-citanya untuk memerdekakan Indonesia. Keinginan MIAI dapat diketahui oleh Jepang, kemudian MIAI dibubarkan diganti dengan Masjumi (Majelis Syjura Muslimin Indonesia) dan pengurus tetap seperti MIAI.

2. Peran Politik Ki Bagus Hadikusumo Tahun 1938-1953

A. Biografi Politik

Ki Bagus Hadikusumo mempunyai nama kecil Raden Hidayat, lahir di kampung Kauman Yogyakarta pada Senin Pahing, 24 November

1890 atau 11 Rabi'ul Akhir tahun 1308 (Djarnawi Hadikusuma, 1979: 6). Ayahnya mempunyai tugas menangani administrasi agama Islam atau sebagai Menteri Agamanya keraton pada masa Sri Sultan Hamengkubuwana VIII (Muhamad Hisyam, 2011: 5). Kakeknya bernama Raden Kaji Isma'il yang menjabat pula sebagai administrasi agama Islam. Raden Hidayat merupakan putera keempat dari delapan bersaudara. Nama kecilnya menggunakan nama Raden, karena keturunan keraton, akan tetapi ketika sudah dewasa, namanya dirubah menjadi Ki Bagus Hadikusumo yang jarang sekali orang Muhammadiyah memakai nama tersebut. Nama "Ki" dan "Hadikusumo" mulai dipakai ketika Ki Bagus Hadikusumo mempunyai hubungan dekat dengan Taman Siswa (Gunawan Budiyo, 2018: 21). Sedangkan kata "Bagus" atau "Gus" adalah sebutan untuk seorang laki-laki jika dalam tradisi pesantren menunjukkan keluarga Kiai.

Anak-anak kauman mendirikan sebuah kelompok lakon sandiwara yang bernama Setambul, yang mempunyai arti dalam bahasa Malaya yaitu bangsawan (Djarnawi Hadikusumo, 1979: 8). Dalam lakon sandiwara tersebut, Ki Bagus Hadikusumo mempunyai peran yang sangat penting yaitu menjadi Pangeran atau Raja Muda (Suharno, 1983: 23). Ki Bagus Hadikusumo juga menggunakan masa mudanya untuk belajar dengan mengenyam pendidikan formal hanya sampai pada *Sekolah Rakyat* atau *Sekolah Ongko Loro* (Suharno, 1983: 31-32). Walaupun hanya lulusan Sekolah Rakyat, Ki Bagus Hadikusumo terus belajar sehingga ilmunya setara atau bahkan lebih tinggi dari orang-orang yang berpendidikan tinggi (Suharno, 1983: 32). Ki Bagus Hadikusumo pun pernah belajar di pesantren Wonokromo dan Pekalongan (Djarnawi Hadikusumo, 1979: 9). Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo juga belajar sampai di luar negeri, yaitu Mekkah (Fuad Nasar, 2018).

Ki Bagus Hadikusumo belajar bahasa Jawa kepada Raden Ngabehi Sosrosugondo. Tidak hanya pandai dalam bahasa Jawa, Ki Bagus Hadikusumo juga pandai bahasa Melayu, Inggris, dan Belanda (Djarnawi, 1979: 10). umur 20 tahun Raden Hidayat meminang seorang wanita yang

berasal dari Yogyakarta yaitu Siti Fatmah, puteri dari Raden Kaji Suhud yang merupakan abdi dalem Keagamaan Kesultanan Yogyakarta (Suhatno, 1983: 25). pernikahannya tersebut dikaruniai 6 orang anak, akan tetapi pernikahannya tidak bertahan lama karena Siti Fatmah meninggal. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo menikah kembali dengan pengusaha Yogyakarta yaitu Mursilah. Dari pernikahan keduanya ini dikaruniai 3 orang anak, dan Mursilah meninggal ketika melahirkan anak ketiganya. Setelah ditinggal istrinya, Ki Bagus Hadikusumo memperistri Siti Suyatimah yang merupakan seorang pengusaha dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu (Suhatno, 1983: 26-27). Ki Bagus Hadikusumo dalam mendidik anak-anaknya sangat tegas dan disiplin, semua anaknya diajarkan bertanggungjawab.

Sebagai seorang pengajar dan ulama, Ki Bagus Hadikusumo juga bekerja sebagai pedagang yang selalu membawa barang dagangannya ketika ada acara tabligh di kota lain. Keahlian dalam berbahasa Jawa, disalurkan melalui karya-karyanya yaitu sebuah kitab yang diterbitkan (Djarnawi Hadikusumo, 1979: 12-13). Ki Bagus Hadikusumo jatuh sakit dan menolak untuk dirujuk di rumah sakit, akan tetapi karena bujukan anak-anaknya akhirnya Ki Bagus Hadikusumo dirawat di Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada di Pugeran (Siswanto Masruri, 2005: 35). Dua minggu dirawat, Ki Bagus Hadikusumo menghembuskan nafasnya pada Jumat, 3 September 1954 pukul 01.00 WIB (Suhatno, 1983: 31). Dimakamkan pada hari Jumat, setelah sholat Jumat di makam Kuncen.

B. Peran Politik

a. Muhammadiyah

Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Nopember 1912 di Yogyakarta, dan dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan (Suhatno, 1983: 37). Beberapa tahun setelah Muhammadiyah berdiri, Ki Bagus Hadikusumo sudah mempunyai peran yang besar dalam bidang keagamaan. Pada tahun 1922 Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota Komisi Perbaikan Pengadilan Agama seluruh Jawa dan Madura yang

diangkat oleh Gubernur Jenderal (Suhatno, 1983: 39). Masa kepemimpinan KH. Ahmad Dahlan, Ki Bagus Hadikusumo mempunyai tugas sebagai ketua Majelis Tabligh (Djarnawi Hadikusumo, 1979: 17). Jabatan sebagai ketua Majelis Tabligh berakhir pada 25 Nopember 1922.

Tahun 1923 Sri Sultan Hamengku Buwono VIII mengangkat Ki Bagus Hadikusumo menjadi anggota Panitia Pengawas Pondok Pesantren seluruh Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan wafat pada 1923 dan pada tahun yang sama Muhammadiyah mengadakan sidang tahunan, Ki Bagus Hadikusumo mempunyai jabatan baru sebagai Juru Priksa (*Commisaris*) bersama Muhammad Basiran, Haji Hajid, Haji Syujak, dan Haji Abdulhamid (Suhatno, 1983: 40). Kemudian pada tahun 1927, dibentuk Majelis Tarjih dengan ketuanya yaitu Hadji Mansur dan Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil ketua (ANRI: Muhammadiyah).

Masa kepemimpinan KH. Ibrahim pada tahun 1926, Ki Bagus Hadikusumo dipilih untuk menjadi anggota Komisi MPM Hoofdbestuur Muhammadiyah (Soeara Moehammadijah, nomor 9: 291). Tahun 1934 Kongres Muhammadiyah dilakukan di Yogyakarta dan Kyai Hisyam terpilih sebagai ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang ketiga (Suhatno, 1983: 41). KH. Mas Mansur menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah pada tahun 1937-1939 dan dilanjutkan pada tahun 1939-1942 dengan wakil ketuanya Ki Bagus Hadikusumo (Gunawan Budiyanto, 2018: 30). Tahun 1938, KH. Mas Mansur mendirikan Partai Islam Indonesia dengan Dr. Sukiman Wiryosanjoyo, Abdul Kahar Muzakir dan Ki Bagus Hadikusumo (Zuly Qodir, 2015: 59).

Ki Bagus Hadikusumo menjabat sebagai Pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1942 -1952 dan wakil ketuanya adalah Haji A, Badawi (Gunawan Budiyanto, 2018: 33). Ki Bagus Hadikusumo menyusun kembali organisasi dan keanggotaan

Muhammadiyah supaya tidak terus menerus mengalami kemunduran (Siswanto Masruri, 2005: 32). Pemerintahan Jepang berupaya untuk menjalankan politik Japanisasi, dengan begitu Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo menekankan ajaran tauhid supaya doktrin Jepang atau *Dai Nippon* dapat di cegah. Era kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo membuat Muhammadiyah menekan kembali persoalan ideologi, politik dan militer. Pemuda dianggap sebagai penerus bangsa yang mempunyai tugas membela Negara. Muhammadiyah menjadi organisasi yang dapat melunakkan pemerintahan Tentara Jepang.

Saat pembentukan Pembela Tanah Air (PETA), orang-orang Muhammadiyah diminta untuk menjadi pemimpin didalamnya. Abdul Hamid Ono seorang perantara dari Jepang meminta Ki Bagus Hadikusumo untuk menyerahkan anggota Muhammadiyah untuk bergabung dengan PETA (Suharno, 1983: 53). Masa Ki Bagus Hadikusumo, para pemuda Muhammadiyah diajak oleh tentara Jepang untuk dilatih menjadi *Cu Dan Co* atau *Co Dan Co*. Pada tanggal 7 Nopember 1945 seluruh organisasi Islam mengadakan kongres di gedung Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah yang dulunya adalah *Kweekschool* Yogyakarta (Suharno, 1983: 74). Ki Bagus Hadikusumo mendapat tanggung jawab baru yaitu menjadi wakil ketua Majelis Syura di Masyumi. Tahun 1950 kembali diadakan Mukhar Partai Masyumi, dan Ki Bagus Hadikusumo terpilih menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat. Selain itu Ki Bagus Hadikusumo adalah orang yang mencetuskan Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (Gunawan Budiyo, 2018: 35).

b. BPUPKI dan PPKI

Berdasarkan majalah *Pandji Poestaka* yang diterbitkan pada Nopember 1943, Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo berkunjung ke Jepang menghadap pemerintah Agung untuk mengucapkan rasa terimakasih karena penduduk Jawa diberikan

kesempatan untuk mengambil bagian dalam pemerintahan sendiri. Langkah selanjutnya yang dilakukan Jepang ialah mengundang tiga tokoh penting Indonesia untuk datang ke Jepang bertemu dengan Kaisar *Tenno Heiko* pada bulan Februari 1945. Tiga tokoh yang mewakili Indonesia adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo (Djarnawi Hadikusumo, 1979: 22). Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo mendapat sambutan hangat di Tokyo dan ditempatkan di hotel Imperial yang biasanya digunakan untuk tamu kenegaraan.). Sebelum pulang ke Indonesia, ketiga tokoh ini di anugerahi *Tenno Heiko* Bintang Ratna Suci II kepada Ir. Soekarno dan Bintang Ratna Suci kelas III kepada Drs. Mohammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo (Gunawan Budiyanto, 2018: 97).

Pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito diumumkan pula pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau *Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai* (Suhatno, 1983: 79).). Jumlah anggota Badan Penyelidik ada 60 dan 15 diantaranya adalah golongan Nasionalis Islam (Deliar Noer, 1987: 31). Politik diartikan sebagai proses penegakan hukum kebenaran dan keadilan, oleh karena itu Ki Bagus Hadikusumo berani berpendapat dalam sidang-sidang Badan Penyelidik dan berargumentasi dengan tokoh nasionalis sekuler. Sidang pertama Badan Penyelidik diselenggarakan pada tanggal 28 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 (Saafroedin Bahar, 1998: 2). Sidang pertama membahas tentang dasar Negara (Floriberta Aning, 2017: 4). Dalam sidang pertama Badan Penyelidik, Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pidatonya dengan diawali surat Al-Fatihah dan membawa kertas kuning yang berisi teks ketikan (Suhatno, 1983: 82). Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan ketidaksetujuannya bahwa agama tidak boleh dicampurkan dengan politik.

Sidang Badan Penyelidik yang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang tanggal 10 Juli diambil keputusan mengenai bentuk Negara. Ki Bagus Hadikusumo pun memberikan usulannya (Saafroedin Bahar, 1998: 127-128):

“...Tuan-tuan yang terhormat, dengan tegas, dengan pendek dan tegas, maka tentang bentuk Negara Indonesia yang akan datang, dalam perkataan republic atau monarkhi, menurut pendapat saya, sudah tersembunyi setan, artinya dua buah perkataan itu bisa menimbulkan perbantahan dan perdebatan yang dahsyat dan memuncak sekali sehingga menyenangkan musuh...Tentang maksudnya saya mufakat, apalagi untuk mempercepat datangnya kemerdekaan, yang pemerintah sendiri juga sudah mengharap-harapkan dan kita minta, supaya kita segera bersatu. Hendaklah tujuannya saja diambil, dan jangan dditambahi dengan “republik” yang tidak tuan sukai. Gambarkan saja apa yang tuan sukai yaitu bahwa Negara dikepalai oleh seorang pemimpin yang tidak turun-temurun dan dimufakati oleh rakyat, dengan pemerintah yang berdasarkan rakyat dan permusyawaratan. Adapun nama “republik” itu, dapat juga disebutkan dalam bahasa Indonesianya dengan singkat, ialah “kedaulatan rakyat”.

Pidato Ki Bagus Hadikusumo dapat diterima dengan baik oleh tokoh lainnya yang menghadiri sidang. Jumlah anggota sidang ada 64 suara dan 55 suara memilih bentuk republik, 6 suara memilih bentuk kerajaan, 2 suara memilih bentuk lain, dan 1 suara blanko.

Pada sidang tanggal 11 telah diambil keputusan mengenai wilayah Negara baru (Saafroedin Bahar, 1998: 166). Sidang tanggal 11 juga membentuk 3 kepanitiaan yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan jumlah anggota 19. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Abikusno Cokrosuyoso dengan jumlah anggota 23. Dan Panitia Keuangan dan Ekonomi diketuai oleh Drs. Mohammad Hatta dengan jumlah anggota 23, Ki Bagus Hadikusumo bergabung dalam kepanitiaan ini.

Sidang tanggal 14 membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan. Rancangan ini dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya yaitu tanggal 14, 15 dan akhirnya disepakati pada 16 Juli 1945 dengan kata-kata dari ketua Badan Penyelidik yaitu Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat

bahwa *Preamble* dan batang tubuh Undang-Undang Dasar diterima “dengan sebulat-bulatnya” (Saafreodin Bahar dkk, 2013: 361). Sidang Badan Penyelidik selesai pada 16 Juli 1945, kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan terbentuk Panitia Perseiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dookuritsu Junbi Inkai* pada tanggal 7 Agustus 1945 (Gunawan Budiyanto, 2018: 99). PPKI beranggotakan 27 orang dengan 4 anggota dari kalangan Islam yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H. A. Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. T.M. Hasan (Lukman Hakiem, 2013: 14-15).

Rapat PPKI pertama pada tanggal 16 Agustus 1945, dilaksanakan dirumah Laksamana Muda Maeda dan dihadiri oleh Angkatan Muda seperti Sukarni, Chaerul Saleh, B.M. Diah serta golongan tua seperti Dr. Buntaran dan Semaun Bakri (Suhatno, 1983: 116). Hasil rapat pertama PPKI menghasilkan tersusunnya teks Proklamasi yang ditanda tangani oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta mewakili bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang di Pejambon dan sebelum sidang banyak yang mengusulkan tentang klausul tujuh kata dalam Piagam Jakarta untuk dihapuskan. Tentu saja hal ini dapat menjadi perdebatan hebat, karena kalangan Islam tidak akan menyetujuinya. Mulanya Ki Bagus Hadikusumo tetap kokoh pada pendiriannya, lalu Mr. Kasman Singodimedjo menjelaskan dengan bahasa Jawa halus mengenai kebijaksanaan Ki Bagus Hadikusumo jika menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut akhirnya luluh.

Setelah selesai dengan tujuh kalimat yang menjadi perdebatan, kemudian sidang dimulai. Mohammad Hata menyampaikan usul perubahan terhadap Muqaddimah dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar hasil keputusan Badan Penyelidik, sebagai berikut (Suhatno, 1983: 118):

- a. Istilah Muqaddimah diganti menjadi Pembukaan.
- b. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

- c. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ditiadakan dari pasal 29 ayat 1.

3. Relevansi dengan Materi Sejarah Indonesia Baru

Peran Ki Bagus Hadikusumo dalam kenegaraan adalah suatu hal yang sangat penting dan seharusnya masuk dalam materi perkuliahan Sejarah Indonesia Baru. Dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Baru menekankan pada tokoh-tokoh yang mempunyai peran dalam Negara Indonesia. Berdasarkan silabus Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah Sejarah Indonesia Baru merupakan mata kuliah yang ada di semester 5 dengan pembagian menjadi 5 materi. Materi pertama adalah latar belakang kebijakan politik etis dan implikasi terhadap nasionalisme. Materi kedua yaitu mengkaji proses-proses reformasi administrasi dan politik di Hindia Belanda. Materi ketiga adalah proses-proses pembentukan identitas bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928 sebagai landasan persatuan bangsa dan bertahannya organisasi politik sampai dengan masa pendudukan Jepang. Pada materi keempat Ujian Tengah Semester, dan materi kelima yaitu situasi Indonesia masa pendudukan Jepang. Materi keenam yaitu persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dengan adanya pembagian menjadi enam materi, peran politik Ki Bagus Hadikusumo seharusnya di bahas di materi keenam karena Ki Bagus Hadikusumo mempunyai peran penting dalam persiapan kemerdekaan. Ki Bagus Hadikusumo bergabung dengan Badan Penyelidik dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta berpendapat di dalam sidangnya, akan tetapi tidak pernah dibahas dalam materi perkuliahan. Peran yang begitu besar dan Ki Bagus Hadikusumo adalah salah satu tokoh dari kalangan Islam yang kokoh dengan pendiriannya tetapi dalam sidang Badan Penyelidik dan PPKI seperti tidak ada karena nama Ki Bagus Hadikusumo jarang ditulis di dalam buku dan dijelaskan.

SIMPULAN

1. Akibat penjajahan yang dilakukan bangsa Belanda, ruang gerak rakyat menjadi terbatas karena adanya hak atas sistem politik Hindia Belanda.

Elit modern sebagai agen pembaharu memunculkan pellawanan dengan mendirikan organisasi modern seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Sarekat Islam dan Muhammadiyah adalah organisasi yang mencampurkan agama dengan politik. Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan ikut serta dalam melawan penjajah dan Ki Bagus Hadikusumo berperan dalam pergerakan nasional Muhammadiyah. Gerakan pembaharuan ini berhasil mendobrak paham yang diciptakan oleh penjajah bahwa agama harus dipisahkan dari sistem pemerintahan. Politik di Hindia Belanda mengalami perubahan dan semakin terbuka karena adanya cita-cita untuk memerdekakan Indonesia serta kemajuannya.

2. Peran politik Ki Bagus Hadikusumo diawali dengan bergabungnya organisasi Muhammadiyah. Ki Bagus Hadikusumo menjadi ketua Muhammadiyah pada tahun 1942-1952. Pada saat menjabat sebagai ketua, Ki Bagus Hadikusumo menyusun kembali organisasi dan keanggotaannya serta menekankan pada ajaran tauhid agar doktrin Jepang dapat di cegah. Ki Bagus Hadikusumo menekan persoalan ideologi, politik dan militer sehingga Muhammadiyah menjadi organisasi yang dapat melunakkan pemerintahan Jepang. Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA), *Cu Dan Co*, dan Masyumi. Ki Bagus Hadikusumo mempunyai peran dalam BPUPKI, di beberapa sidang BPUPKI Ki Bagus Hadikusumo menyampaikan pendapatnya tentang dasar Negara Islam. Mewakili umat Islam Indonesia Ki Bagus Hadikusumo berpendapat bahwa Islam harus dijadikan pondasi untuk Indonesia merdeka.
3. Relevansinya sebagai pengembangan sumber materi Sejarah Indonesia Baru yaitu sebagai bahan ajar, Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh penting yang mempunyai peran dalam kemerdekaan Indonesia. Ki Bagus Hadikusumo merupakan tokoh nasionalis Islam yang bergabung dalam BPUPKI dan PPKI. Selain itu, Ki Bagus Hadikusumo adalah tokoh yang mencetuskan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” karena adanya perdebatan dalam menggunakan kalimat tersebut. Sebagai pengembangan

sumber materi Sejarah Indonesia Baru, maka peran politik Ki Bagus Hadikusumo tahun 1938-1953 sangat perlu dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 1989. *Muhammadiyah The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aning, Floriberta. 2017. *Lahirnya Pancasila Kumpulan Pidato BPUPKI*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Aryanti, Tutin. (2015). Branding the Islamic Village: Modesty and Identity in Yogyakarta Kauman Village, Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Volume 184, 20 May 2015 Pages 126-134. Diperoleh pada tanggal 10 Juni 2019, dari <https://www.sciencedirect.com/>.
- Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati. 1998. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Binfas, Maman A. Majid., Fitriani, Somariah & Wahjusaputri, Sintha. (2018). Muhammadiyah-Nahdlatul Ulama (NU): Monumental Cultural Creativity Heritage Of The World Religion. *Islamic Science Development*. Volume 13 (1), Juni 2018 Pages 174-193. Diperoleh pada tanggal 10 Juni 2019, dari <http://e-resources.perpusnas.go.id>.
- Bolland, BJ. 1985. *Pergumulan Islam di Indonesia* (terjemahan). Jakarta: Grafiti Pers.
- Budiyanto, Gunawan dkk. 2018. *Konstruksi Pemikiran Politik Ki Bagus Hadikusumo: Islam, Pancasila dan Negara*. Yogyakarta: Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik.
- Emerson, Donald K. 1976. *Indonesia's Elite: Political Culture and Culture Politics*. Cornell University: Itacha.

- Engelen O. E , dkk. 1997. *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hadikusuma, Djarnawi. 1979. *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjuangan dan buah pikiran Ki Bagus Hadikusuma*. Yogyakarta: Persatuan.
- Hisyam, Muhamad. (2011). Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-Agama. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 13 (2), 1-27. Diperoleh pada tanggal 17 Januari 2019, dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id>.
- Ir. Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. 2005. *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Moedjanto, G. 1988. *Indonesia Abad Ke-20 1: Dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nashir, Hedar. Januari 2011. *Muhammadiyah Abad Kedua (Suara Muhammadiyah)*. Yogyakarta.
- Pandji Poestaka. Nopember 1943,
- Ricklefs. 1989. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs. 2012. *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Saleh, Khoirul & Munif, Achmat. (2015). Membangun Karakter Budaya Politik Dalam Berdemokrasi. *Jurnal AIDDIN*. Volume 9 (2), 309-332. Diperoleh pada tanggal 5 Juni 2019, dari <https://media.neliti.com/media/publications/53625-ID-membangun-karakter-budaya-politik-dalam.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Suhatno. 1983. *Ki Bagus Hadikusumo: Hasil Karya dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2010. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani Pustaka Semesta.

Syaifullah. 2015. *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syarif, Mujar Ibnu. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum*. Volume 4 (1), 15-32. Diperoleh pada tanggal 5 Juni 2019, dari <http://e-resources.perpusnas.go.id>.